

NO. KATALOG: 4102002.1702

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN REJANG LEBONG

2021



<https://rejanglebong.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REJANG LEBONG**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN REJANG LEBONG

2021



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021

Nomor ISSN : 2716-3032
Katalog BPS : 4102002.1702
Nomor Publikasi : 17020.2226
Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm
Jumlah Halaman : x + 50 halaman

<https://rejanglebongkab.bps.go.id>

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Rialdo Eka Putera, S.E, M.Si

Penyunting : Nova Primeri, SST

Penulis : 1. Esa Ramadhani Febriyanti, S.Stat
2. Marlina, SST

Gambar Kulit : Suci Dyah Maulidina Putri, A.Md

Diterbitkan Oleh : © BPS Kabupaten Rejang Lebong

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak, dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya sekolah, serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Dengan ini, maka diharapkan agar daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Semoga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong 2021 bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan.

Curup, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Rejang Lebong



Rialdo Eka Putera, S.E, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab 1 Penjelasan Umum.....	1
1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan.....	1
1.2. Dimensi Pembangunan Manusia.....	6
1.3. Tujuan Pembangunan Manusia.....	8
1.4. Ruang Lingkup.....	10
1.5. Sistematika Penyajian.....	10
Bab 2 Metodologi.....	12
2.1. Indikator.....	12
2.2. Metode Penghitungan.....	13
2.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	15
2.4. Klasifikasi/Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia.....	23
2.5. Sumber Data Ipm.....	24
Bab 3 Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong.....	25
3.1. Keadaan Geografis.....	25
3.2. Penduduk.....	26
3.3. Kesehatan.....	27
3.4. Pendidikan.....	32
3.5. Potensi Ekonomi.....	35

Bab 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong	38
4.1. Umur Harapan Hidup	39
4.2. Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah	40
4.3. Indeks Daya Beli	42
4.4. Indeks Pembangunan Manusia	44
4.5. Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota	46
Bab 5 Penutup	47
5.1. Kesimpulan	47
5.2. Implikasi Kebijakan	48
Daftar Pustaka	50

<https://rejanglebongkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian.....	14
Tabel 2. Tahun Konversi/Skor dari Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	18
Tabel 3. Daftar Paket Komoditi Makanan yang Digunakan dalam Penghitungan	21
Tabel 4. Daftar Paket Komoditi Non Makanan yang Digunakan dalam Penghitungan	22
Tabel 5. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin	27
Tabel 6. Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga Kab. Rejang Lebong Tahun 2021	30
Tabel 7. Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas pada Rumah Tangga Kab. Rejang Lebong 2021	31
Tabel 8. Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang Digunakan oleh Rura di Kab. Rejang Lebong Tahun 2021	31
Tabel 9. Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Kab. Rejang Lebong Tahun 2021	34
Tabel 10. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Rejang Lebong 2020	35
Tabel 11. Nilai dan Peringkat IPM Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021	46

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Perkembangan Metode Penghitungan IPM	5
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Rejang Lebong	26
Gambar 3. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab. Rejang Lebong Tahun 2021 ...	28
Gambar 4. Jumlah Sekolah di Kab. Rejang Lebong Tahun 2021	33
Gambar 5. Jumlah Tenaga Pengajar di Kab. Rejang Lebong Tahun 2021	34
Gambar 6. PDRB Kab. Rejang Lebong Tahun 2017-2021	37
Gambar 7. Umur Harapan Hidup Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021	40
Gambar 8. Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021	41
Gambar 9. Rata-Rata Lama Sekolah di Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021	42
Gambar 10. Pengeluaran per kapita Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021	43
Gambar 11. Pengeluaran per Kapita Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021	44
Gambar 12. IPM Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011- 2021	45

BAB 1

PENJELASAN UMUM

1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan

Seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin adanya perbaikan taraf hidup sebagian besar penduduk. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memang sebuah ukuran yang penting dalam pembangunan nasional. Namun, kedua indikator tersebut belum menjelaskan fakta bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Terjadinya pergeseran paradigma mengenai pembangunan ini, membuat adanya perluasan konsep bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pendapatan, modal, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja.

Pada Tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia melalui laporan *Human Development Report (HDR)*. Konsep pembangunan manusia ini, tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam laporannya, UNDP menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan bukan hanya *input* dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan produktif (UNDP, 1990).

Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang

dikemukakan oleh UNDP pada Tahun 1990 memberikan nuansa baru dalam memahami pembangunan. Cara pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumberdaya manusia, kesejahteraan manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi atau sebaliknya.
- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Keduanya berfokus pada sisi penawaran, dimana manusia dipandang sebagai sumberdaya untuk menghasilkan produksi. Akan tetapi, manusia memiliki nilai lebih dari barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan manusia daripada sebagai peserta di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.
- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

Sebagaimana dinyatakan dalam *Human Development Report (HDR)* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Di

antara pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang, sehat, berilmu pengetahuan dan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak. Pada HDR 1990 diperkenalkan tiga dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut diwakili dengan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan metode rata-rata aritmatik.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010 UNDP melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam penghitungan IPM dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama tetapi merubah indikator yang digunakan, yaitu:

1. Agregasi Angka Melek Huruf (AMH) dan kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi agregasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS);
2. PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Selain perubahan pada indikator, UNDP juga merubah penghitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik, seangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan bahwa suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi dijadikan indikator perkembangan

pendidikan karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar negara sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarnegara dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit menjadi tidak relevan, sehingga indikator AMH perlu diganti dengan indikator yang representatif.

Indikator berikutnya yang diganti adalah PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang turut menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri dalam penghitungan. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Kedua, penggunaan rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sementara itu, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan. Penggunaan rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah (BPS, 2015) sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik.

IPM metode baru yang disempurnakan pada tahun 2014 memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya adalah:

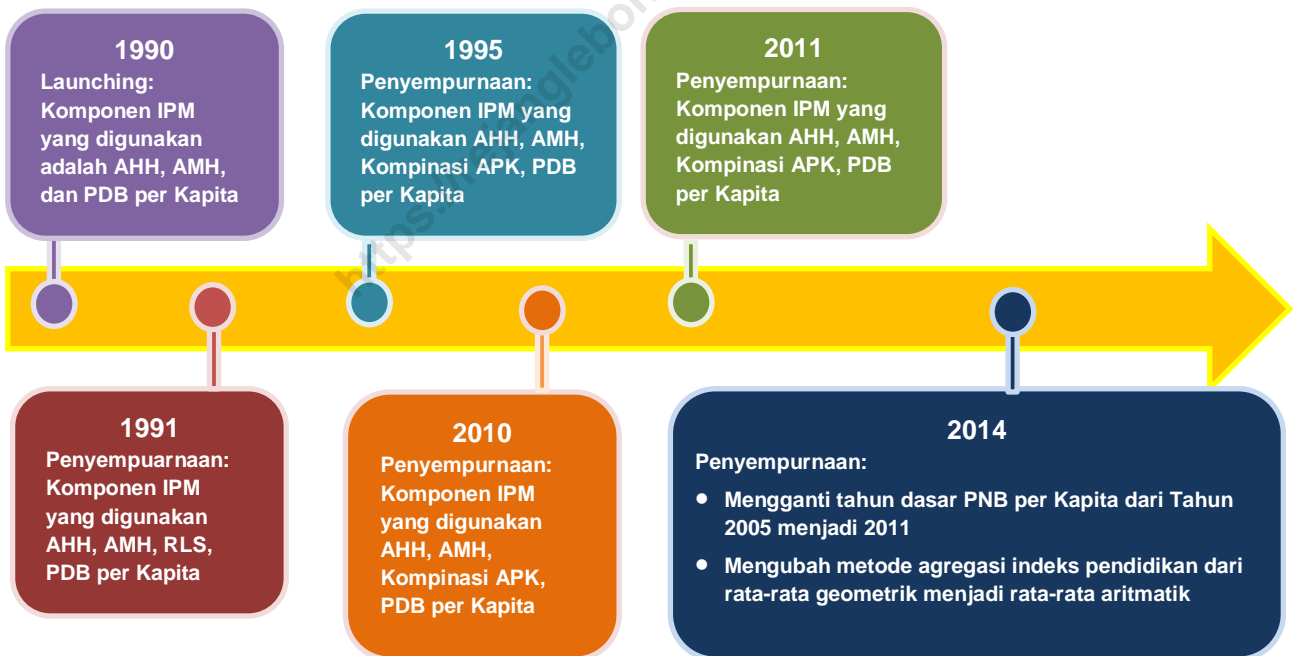
1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik.
 - Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya;
 - Penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; menggunakan rata-rata geometrik yang tidak serta merta dapat

menutupi

2. Kekurangan pada suatu dimensi dengan dimenensi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik diperlukan keseimbangan antardimensi yang sama pentingnya.

Tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB perkapita diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan SUSENAS



Gambar 1. Perkembangan Metode Penghitungan IPM

1.2. Dimensi Pembangunan Manusia

Pada Tahun 1990 UNDP menetapkan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiganya dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan saat ini. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan umur harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang bersumber dari hasil sensus penduduk Tahun 2010. Metode estimasi yang digunakan adalah metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan jarak kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merefleksikan dari

kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan dalam kehidupan produktif masyarakat modern. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama. Adapun dalam penghitungan indeks HLS dan RLS digunakan batasan nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP yaitu nilai maksimum dan minimum untuk HLS masing-masing 18 dan 0 tahun, sedangkan untuk RLS masing-masing 15 dan 0 tahun. Sumber data yang digunakan untuk indikator HLS dan RLS adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama dan hasil inventarisasi data sektoral di daerah. Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah pemenuhan standar hidup yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, mengingat data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah, maka dipilih alternatif lain berupa indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini dapat dihitung hingga level kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai *output* dari semakin membaiknya perekonomian. Data rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan hasil Susenas modul

konsumsi, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.

1.3. Tujuan Pembangunan Manusia

Pada tahun 2015, isu tentang pembangunan Kembali menghangat. Di tahun ini, Millenium Development Goals (MDGs) memasuki batas tahun pencapaian. MDGs merupakan referensi penting pembangunan di Indonesia. Agenda MDGs akan dilanjutkan dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015 yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs).

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin (Bappenas).

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs, yaitu:

1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human Development) yaitu pendidikan dan kesehatan.
2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (Sosial Economic Development) yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.
3. Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Kemudian berbagai program pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk harus selalu dievaluasi menggunakan berbagai indikator. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu

kajian analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengukuran IPM Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

1. Mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
2. Sebagai salah satu alat ukur kinerja suatu daerah, terutama dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.
3. Sebagai alat untuk mempersiapkan kemajuan pembangunan antar kabupaten di suatu wilayah tertentu.
4. Sebagai *input* dan *output* terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
5. Sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
6. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti, cendekiawan, pelaku ekonomi dan konsumen data dalam pelaksanaan riset maupun sumber pustaka.
7. Sebagai bahan kajian yang bersifat analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk.
8. Ketersediaan berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berjarak dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Sebagai acuan penajaman prioritas pembangunan. Artinya, perubahan pola penganggaran pembangunan yang selama ini menggunakan aturan kesepakatan dari pihak penentu ke pola pembangunan yang lebih memihak orang banyak. Dengan demikian, kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada aspek efisiensi dan efektivitas anggaran.

1.4. Ruang Lingkup

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang pelaksanaan pengumpulan datanya memakai metode sampling dengan jumlah sampel yang relatif terbatas, sehingga akurasi dari indikator-indikator yang dihasilkan akan sangat tergantung dari seberapa besar sampling maupun nonsampling error yang terkandung didalamnya.

1.5. Sistematika Penyajian

Penyajian buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong 2021 ini terbagi ke dalam empat bab sebagai berikut :

Bab 1. Penjelasan Umum, menyajikan :

- 1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan
- 1.2. Dimensi Pembangunan Manusia
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Sistematika Penyajian

Bab 2. Metodologi, menyajikan :

- 2.1. Indikator
- 2.2. Metode Penghitungan
- 2.3. Komponen IPM
- 2.4. Klasifikasi/Pengelompokan IPM
- 2.5. Sumber Data IPM

Bab 3. Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong, menyajikan :

- 3.1. Keadaan Geografis
- 3.2. Penduduk
- 3.3. Kesehatan
- 3.4. Pendidikan

3.5 Potensi Ekonomi

Bab 4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rejang Lebong

4.1. Umur Harapan Hidup

4.2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

4.3. Indeks Daya Beli

4.4. Indeks Pembangunan Manusia

4.5. Perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota

Bab 5. Penutup

5.1. Kesimpulan

5.2. Implikasi Kebijakan

<https://rejanglebongkab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Indikator

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan lain :

1. Sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut.
2. Obyektif, untuk hal yang sama indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.
3. Sensitif, perubahan yang kecil mampu terdeteksi oleh indikator.
4. Spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud, namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB), dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari tiga jenis indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup dari anak usia satu tahun (AHHe₁).

Menurut jenisnya indikator dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Indikator input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio penduduk-dokter, rasio penduduk-puskesmas dan lain sebagainya.
2. Indikator proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Jumlah Jam Kerja, Rata-rata Jumlah Kunjungan ke Puskesmas, Persentase Proses Kelahiran yang Ditolong oleh Dukun.
3. Indikator *Output/Outcome*, yang menggambarkan bagaimana hasil (*output*) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti : persentase penduduk dengan pendidikan SMU/setara ke atas, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH) dan lain-lain.

2.2. Metode Penghitungan

Metodologi yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum sama seperti yang dilakukan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menyusun *Human Development Index (HDI)* tahun 1994 juga telah diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

IPM diperoleh melalui dua tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah menghitung indeks masing-masing komponen pembentuk IPM, meliputi Indeks Harapan Hidup, Indeks Pengetahuan dan Indeks Pengeluaran. Adapun rumus penghitungan indeks masing-masing komponen IPM adalah:

$$\text{Indeks } X_i = \left(\frac{(X_i - X_{min})}{(X_{max} - X_{min})} \right) \times 100$$

Keterangan:

X_i = Indikator Komponen IPM ke- i ($i = 1,2,3$)

X_{min} = Nilai Minimum dari X_i

X_{max} = Nilai Maksimum dari X_i

Besarnya nilai minimum dan maksimum adalah berdasarkan standar dari UNDP. Dari persamaan di atas akan menghasilkan angka $0 < Indeks (\hat{X}_i) < 1$ dan untuk mempermudah membaca nilai indeks, maka persamaan tersebut dikalikan dengan 100 sehingga menjadi $0 < Indeks (X_i) < 100$.

Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)		(2)		(3)	
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352* (Rp)

* Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator pengeluaran

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten Tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang

diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

2. Tahap kedua adalah menghitung IPM dengan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu indikator kesehatan (Indeks Harapan Hidup), indikator pengetahuan (Indeks Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan indikator Pengeluaran (paritas daya beli). Ketiga indikator tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir - AHH (Life Expectancy – e0)

Untuk mengukur usia hidup, *United Nations Development Programme (UNDP)* menggunakan indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life-expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen penghitungan

IPM. Angka harapan hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu daerah. Angka harapan hidup dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010).

Untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung dengan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan umur harapan hidup sejak lahir (UHH_0 atau e_0) dilakukan dengan menggunakan *software Mortpack* (metode *trussel* dengan model *west*).

Setelah mendapatkan umur harapan hidup sejak lahir, selanjutnya dihitung Indeks Harapan Hidup (Indeks UHH_0) yaitu dengan membandingkan angka tersebut dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan nilai maksimum untuk umur harapan hidup yaitu masing-masing 20 tahun dan 85 tahun). Formula Indeks AHH_0 adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } UHH_0 = \frac{UHH_{0,t} - UHH_{0,\min}}{UHH_{0,\max} - UHH_{0,\min}} \times 100$$

Keterangan:

$UHH_{0,t}$ = Umur Harapan Hidup Tahun ke- t

$UHH_{0,\min}$ = Umur Harapan Hidup Minimum (25)

$UHH_{0,\max}$ = Umur Harapan Hidup Maksimum (85)

2. Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (*Mean Years of Schooling/MYS*)

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama menghitung lama sekolah

untuk masing-masing individu menggunakan pola hubungan antar variabel. Tahap selanjutnya menghitung rata-rata lama sekolah. Adapun formula yang digunakan adalah:

$$MYS = \frac{\sum_i f_i * j_i}{\sum_i f_i}$$

Keterangan:

MYS = Rata-rata lama sekolah

f_i = Frekuensi penduduk usia 25 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan i

j_i = Lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau tingkat pendidikan yang pernah diduduki

i = Jenjang pendidikan

Indeks Rata-Rata Lama Sekolah diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks } RLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \times 100$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

RLS_{min} = Rata-rata Lama Sekolah Minimum (0)

RLS_{max} = Rata-rata Lama Sekolah Maksimum (15)

Adapun jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan skor yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tahun Konversi/Skor dari Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Skor/Tahun Konversi
(1)	(2)
Tidak pernah sekolah	0
Sekolah Dasar	6
SMP	9
SMU	12
Diploma I	13
Diploma II	14
Diploma III	15
Diploma IV/Sarjana	16
Magister (S2)	19
Doktor (S3)	21

3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS/ *Expected Years of Schooling-EYS*)

Tingkat perkembangan pendidikan suatu daerah dapat dievaluasi dengan melihat besarnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren ini berasal dari Direktorat Pendidikan Islam.

Format penghitungan harapan lama sekolah adalah sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

FK : Faktor koreksi pesantren

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)

Faktor koreksi pesantren

$$\text{Rasio santri mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{jumlah santri sekolah}$

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

$$\text{Indeks HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} = Harapan Lama Sekolah Minimum (0)

HLS_{max} = Harapan Lama Sekolah Maksimum (18)

4. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan rata-rata antara indeks HLS dan indeks RLS. Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh

penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Untuk memperoleh Indeks pendidikan, digunakan formula sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

dengan:

$$I_{HLS} = \text{Indeks HLS}, I_{RLS} = \text{Indeks RLS}$$

5. Tingkat Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) dan Indeks Pengeluaran

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari SUSENAS Modul dan dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan kelompok makanan dan sisanya merupakan kelompok non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

p_{ij} = Harga komoditas- i di kab/kota- j

p_{ik} = Harga komoditas- i di Jakarta Selatan

m = jumlah komoditas

Jakarta Selatan dijadikan sebagai patokan/standar supaya IPM (khususnya PPP) kabupaten/kota dapat diperbandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia.

Tabel 3. Daftar Paket Komoditi Makanan yang Digunakan dalam Penghitungan

Komoditi	Komoditi
Beras	Pepaya
Tepung terigu	Minyak Kelapa
Singkong	Minyak Goreng Lainnya
Kentang	Kelapa
Tuna/Tongkol/Cangkalang	Gula Pasir
Kembung	Teh
Bandeng	Kopi
Mujair	Garam
Mas	Kecap
Lele	Penyedap Masakan/Pepsin
Ikan Segar Lainnya	Mie Instan
Daging Sapi	Roti Manis/Roti Lainnya
Daging Ayam Ras	Kue Kering
Daging Ayam Kampung	Kue Basah
Telur Ayam Ras	Makanan Gorengan
Susu Kental Manis	Gado-gado/Ketoprak
Susu Bubuk	Nasi Campu/Rames
Susu Bubuk Bayi	Nasi Goreng
Bayam	Nasi Putih
Kangkung	Lontong/Ketupat sayur
Kacang Panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang
Bawang Merah	Sate/Tongseng
Bawang Putih	Mie Bakso/mie rebus/mie goreng
Cabe Merah	Makanan ringan anak
Cabe Rawit	ikan (goreng/bakar, dll)
Tahu	Ayam/daging (goreng, dll)
Tempe	Makanan Jadi lainnya
Jeruk	Air Kemasan Galon
Mangga	Minuman Jadi Lainnya
Salak	Es lainnya
Pisang Ambon	Rokok kretek filter
Pisang Raja	Rokok kretek tanpa filter
Pisang Lainnya	Rokok Putih

Tabel 4. Daftar Paket Komoditi Non Makanan yang Digunakan dalam Penghitungan

Komoditi
Rumah Sendiri/Bebas Sewa
Rumah Kontrak
Rumah Sewa
Rumah Dinas
Listrik
AIR PAM
LPG
Minyak Tanah
Lainnya (batu Baterai, aki, korek, obat nyamuk dll)
Perlengkapan Mandi
Barang Kacantikan
Perawatan kulit, muka, kuku/ rambut
Sabun cuci
Biaya RS Pemerintah
Biaya RS Swasta
Puskesmas/pustu
Praktek Dokter/poliklinik
SPP
Bensin
Transportasi/pengangkutan umum
Pos dan Telekomuniaksi
Pakaian Jadi laki-laki dewasa
pakaian jadi anak-anak
alas kaki
minyak pelumas
meubelair
Peralatan Rumah Tangga
Perlengkapan perabot rumah tangga
Alat-alat dapur/makan

2.4. Klasifikasi/Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM dikasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. $IPM < 60$ termasuk ke dalam kelompok IPM rendah,
2. IPM antara $60 \leq IPM < 70$ termasuk ke dalam kelompok IPM sedang,
3. IPM antara $70 \leq IPM < 80$ termasuk ke dalam kelompok IPM tinggi,
4. $IPM \geq 80$ termasuk ke dalam kelompok IPM sangat tinggi.

Jika dalam penghitungan IPM dengan metode lama menggunakan reduksi *shortfall* sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal ($IPM=100$) maka pada penghitungan metode baru ini menggunakan metode pertumbuhan aritmatik dimana pertumbuhan ini melihat progres/perkembangan yang ada, tidak hanya melihat ranking. Hal ini akan mengakibatkan level IPM secara umum lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama serta mengakibatkan terjadinya perubahan peringkat IPM. Meskipun terjadi perubahan peringkat namun peringkat ini tidak bisa diperbandingkan, hal ini dikarenakan perbedaan indikator dan metodologi.

2.5. Sumber Data IPM

Sumber data dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). SUSENAS dilaksanakan setiap tahun menggunakan dua jenis kuesioner yaitu kuesioner kor (pertanyaan pokok) dan kuesioner modul. Kuesioner modul terdiri dari tiga jenis modul yaitu modul konsumsi dan pendapatan, modul sosial budaya, perjalanan, persepsi kesejahteraan dan kriminalitas, serta modul kesehatan, pendidikan dan perumahan. Ketiga modul tersebut dilaksanakan bergilir setiap tahunnya. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

BAB 3

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

3.1. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada awalnya merupakan gabungan dari wilayah Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, maka wilayah Kabupaten Rejang Lebong telah terbagi menjadi tiga kabupaten. Kabupaten Rejang Lebong diapit oleh pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat dan di sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba. Kabupaten Rejang Lebong berbatasan dengan Kabupaten Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah 1.550,28 Km^2 yang terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Curup, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Bindu Riang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, dan Kecamatan Selupu Rejang. Kabupaten Rejang Lebong beribukota di Curup sejak tahun 1956. Curup yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rejang

Lebong ini juga merupakan pusat perekonomian dari Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 156 Desa di 15 kecamatan tersebut.



Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

3.2. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2021 sebanyak 278.793 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 142.356 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 136.437 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,34.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2021 adalah sebanyak 215 orang terdiri dari 54% laki-laki dan 46% perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja pada Tahun 2020, jumlah pencari kerja Tahun 2021 Kabupaten Rejang Lebong mengalami kenaikan sebanyak 38.71%. Dari

jumlah 215 pencari kerja yang terdaftar, 2 orang berpendidikan SMP/ sederajat, 61 orang berpendidikan SMA/ sederajat, dan 152 orang lainnya berpendidikan tingkat diploma dan universitas.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah/Total
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0
SD/ sederajat	0	0	0
SMP/ sederajat	2	0	2
SMA/ sederajat	45	16	61
Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas)	69	83	152
Jumlah/Total	116	99	215

3.3. Kesehatan

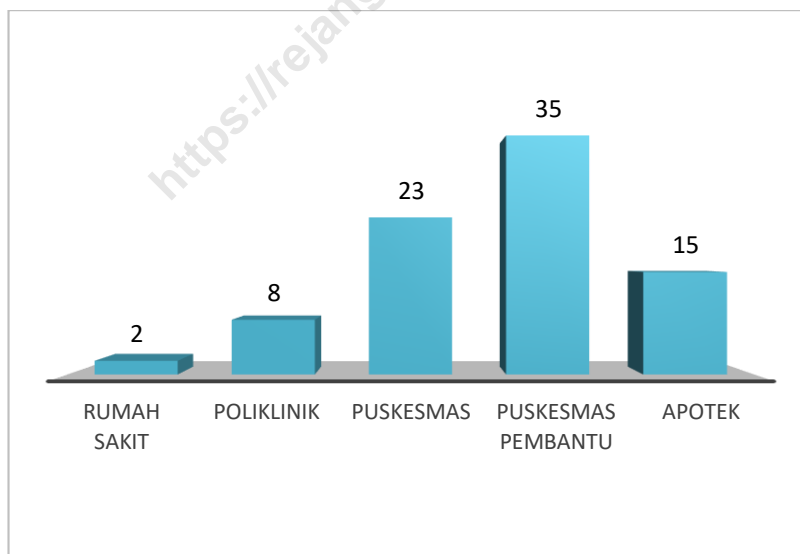
Kesehatan merupakan indikator penting karena termasuk salah satu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Peningkatan taraf kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Sebaliknya, tingkat kesehatan penduduk yang kurang akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan yang imbasnya akan berakibat pada perekonomian dan kondisi sosial penduduk itu sendiri.

a. Status Kesehatan

Kurang baiknya status kesehatan penduduk dapat dilihat dari angka kesakitan penduduk. Angka kesakitan penduduk adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat tersebut. Besar angka kesakitan penduduk Kab. Rejang Lebong pada Tahun 2021 adalah sebesar 11.47% (Susenas Maret 2021).

b. Akses Pada Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2021 yaitu terdapat 2 unit rumah sakit, 13 poliklinik, 22 puskesmas, 42 puskesmas pembantu, dan 15 Apotek.



Gambar 3. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab. Rejang Lebong Tahun 2021

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang pernah berobat jalan ataupun

mengobati sendiri. Dari total seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan 83,42% mengobati sendiri selama satu bulan terakhir menurut Data Susenas Maret 2021 Kab. Rejang Lebong. Sementara itu, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang menjalani berobat jalan selama satu bulan terakhir menurut Data Susenas Maret 2021 mencapai 36,95%. Hal yang mendorong penduduk melakukan pengobatan sendiri bisa disebabkan karena penyakit yang diderita dianggap tidak tergolong berat sehingga cukup dengan membeli obat yang tersedia di warung atau toko obat. Persentase penduduk yang merasa cukup mengobati sendiri atau tidak perlu berobat ke tenaga kesehatan adalah sebesar 63,12%.

Derajat kesehatan penduduk Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup. Umur harapan hidup Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2021 adalah 68,75 tahun meningkat jika dibandingkan dengan umur harapan hidup (UHH) Tahun 2020 yaitu 68,57 tahun. Peningkatan umur harapan hidup dapat menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin membaik.

c. Fasilitas Perumahan dan Air Minum

Selain sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah, kondisi dan fasilitas tempat tinggal juga menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Rejang Lebong persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN sebesar 99,17%; listrik non PLN sebesar 0,3%; dan yang menggunakan bukan listrik sebesar 0,6%.

Berdasarkan data Susenas Maret 2021, terdapat 66,21% rumah tangga sudah menggunakan sumber air minum bersih. Dimana yang dimaksud dengan sumber air minum bersih adalah air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur

terlindung, serta mata air terlindung dengan dengan jarak minimal 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara 38,63% rumah tangga memiliki sumber air minum layak. Sumber air minum layak adalah sumber air minum yang berasal dari leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung dengan jarak lebih dari 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Persentase sumber air minum yang digunakan rumah tangga berdasarkan hasil Susenas 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga Kab. Rejang Lebong Tahun 2021

Sumber Air Minum	Persentase
Air Kemasan/ Isi Ulang	1,3
Leding	14,3
Sumur Bor/pompa	5,1
Sumur/Mata Air Terlindung	45,5
Sumur/Mata Air Tak Terlindung	33,6
Lainnya	0.2

Kemudian untuk bahan bangunan dinding rumah terluas yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga Kabupaten Rejang Lebong adalah tembok sebesar 79,1% rumah tangga, kemudian 15,2% rumah tangga menggunakan kayu/papan, sebanyak 5,2% rumah tangga menggunakan plesteran anyaman bambu/kawat, dan 0,5% rumah tangga menggunakan anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya (Susenas Maret 2021). Rincian penggunaan bahan bangunan utama dinding rumah terluas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas pada Rumah Tangga Kab. Rejang Lebong 2021

Bahan Bangunan Dinding	Persentase
Tembok	79,1
Plesteran Anyaman Bambu/Kawat	5,2
Kayu/papan	15,2
Anyaman Bambu	0,3
Lainnya	0,2

Menurut Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Rejang Lebong Tahun 2021, persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri sebanyak 87,76% dan lainnya termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar sebesar 12,24%. Kemudian, banyaknya rumah tangga menggunakan Tangki Septik/IPAL/SPAL sebagai tempat buang air besar adalah sebesar 38,55% dan 61,45% menggunakan lainnya seperti. Hal tersebut dapat menggambarkan seberapa besar pemahaman masyarakat tentang kesadaran kebersihan. Selanjutnya untuk tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan oleh rumah tangga di Kab. Rejang Lebong Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang Digunakan oleh Rura di Kab. Rejang Lebong Tahun 2021

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase
Tangki Septik/IPAL/SPAL	39,25

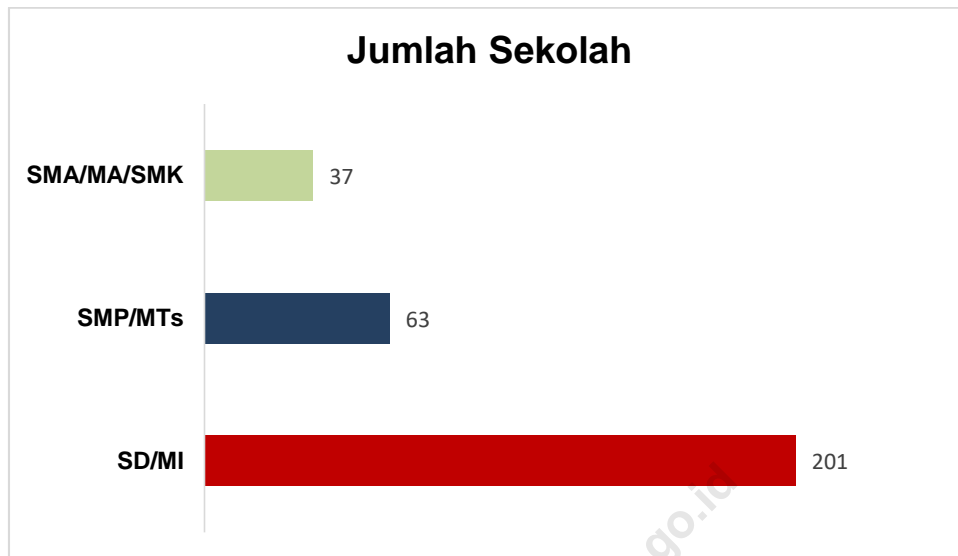
Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	3,17
Lubang Tanah	57,57

Sumber : Susenas Maret 2021

3.4. Pendidikan

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor mendasar kemajuan suatu bangsa dan tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alam yang ada di negara tersebut. SDM yang bermutu dalam pengertian teknis, kemampuan, keahlian, keterampilan serta nilai-nilai modern lainnya tetap diperlukan dan akan menjadi prasyarat mutlak untuk dapat mencapai keunggulan bagi suatu bangsa. Pergeseran struktur masyarakat juga memiliki dampak mendasar dan berimplikasi terhadap terjadinya transisi kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Pergeseran struktur masyarakat dari struktur tradisional ke struktur industri ditandai dari berkurangnya jenis pekerjaan pada sektor pertanian dan bertambahnya jenis pekerjaan pada sektor industri. Dalam beberapa tahun yang akan datang, jenis pekerjaan tradisional yang mengandalkan keterampilan motoris akan tergantikan oleh jenis pekerjaan yang berlandaskan pada otomatisasi dan pengolahan informasi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki profil pendidikan sudah merupakan suatu gejala universal. Pendidikan adalah suatu bentuk investasi yang produktif dan dipandang sebagai sarana untuk memasuki lingkungan kerja yang bersifat modern.

Untuk melihat sejauh mana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong sudah mencapai sasaran, dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, di antaranya adalah ketersediaan sekolah, tenaga pengajar, kemampuan baca tulis, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan.

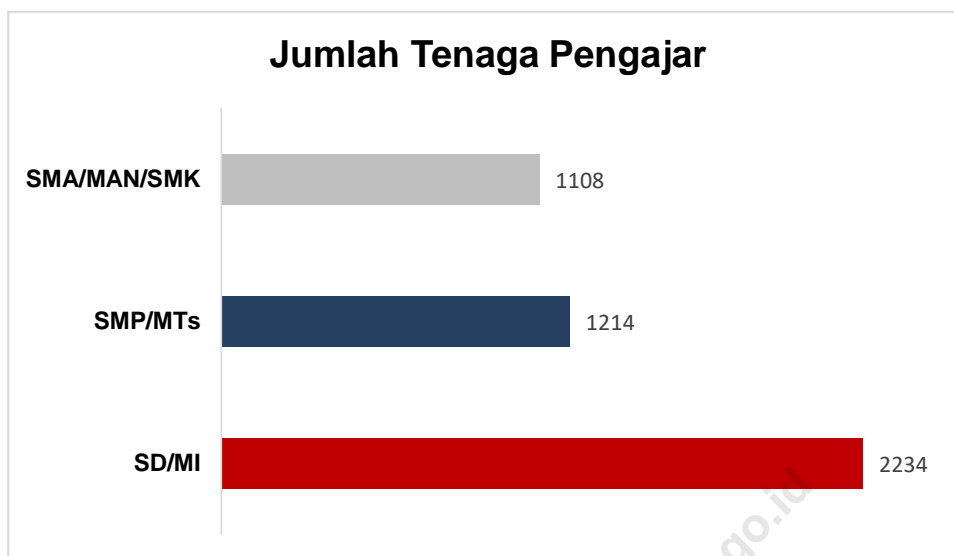


Gambar 4. Jumlah Sekolah di Kab. Rejang Lebong Tahun 2021

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2021

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong pada 2021 adalah SD/MI sebanyak 201 sekolah, SMP/MTS terdapat 63 sekolah dan 37 sekolah untuk tingkat pendidikan SMA/MAN/SMK. Keseluruhan sekolah tersebut tersebar di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Keseluruhan sekolah yang tercantum ini merupakan sekolah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Selain melihat jumlah sekolah, ketersediaan tenaga pengajar juga harus diperhatikan karena kualitas siswa berhubungan positif dengan kualitas dan kuantitas guru. Penyebaran tenaga guru yang merata baik di daerah pedesaan maupun perkotaan juga akan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan.



Gambar 5. Jumlah Tenaga Pengajar di Kab. Rejang Lebong Tahun 2020

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2020

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimal yang dibutuhkan penduduk untuk dapat menuju hidup yang lebih baik. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tersedia pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Kab. Rejang Lebong Tahun 2021

Kemampuan Membaca dan Menulis	Persentase	
	Laki-Laki	Perempuan
Huruf Latin	98,65	97,16
Huruf Lainnya	23,44	26,87

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Rejang Lebong Tahun 2021

Secara rata-rata 98,65% penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Rejang Lebong bisa membaca dan menulis huruf latin dan 23,44% bisa

membaca dan menulis huruf lainnya. Persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin Tahun 2021 lebih sedikit 0,24% dibandingkan dengan Tahun 2020. Dari data di atas juga dapat disimpulkan masih ada 1,35% penduduk laki-laki dan 2,84% penduduk perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Oleh karena itu, program pemerintah untuk semakin memperkecil jumlah penduduk yang buta huruf masih sangat diperlukan.

Tabel 10. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Rejang Lebong 2021

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Laki-Laki	Perempuan	Rejang Lebong
Tidak Punya Ijazah SD	15,22	17,65	16,42
SD/ sederajat	24,88	24,01	24,45
SMP/ sederajat	19,59	21,68	20,62
SMA/ ke atas	40,31	36,66	38,51

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Rejang Lebong Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk Kab. Rejang Lebong berdasarkan pendidikan yang ditamatkan pada 2021 paling banyak berijazah SMA/ke atas.

3.5. Potensi Ekonomi

Pada 2021 perekonomian Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rejang Lebong atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 2021 sebesar 10,09 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan PDRB tahun sebelumnya yang sebesar 9,54 triliun rupiah.

PDRB Kabupaten Rejang Lebong 2021 atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh kode kategori lapangan usaha Kategori A yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 30,98 persen. Kontribusi lapangan usaha ini masih dominan dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Jika dilihat dari trend yang ada tampak kecenderungan penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, namun kontribusi Lapangan Usaha Kategori A terhadap total PDRB Kab. Rejang Lebong pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan.

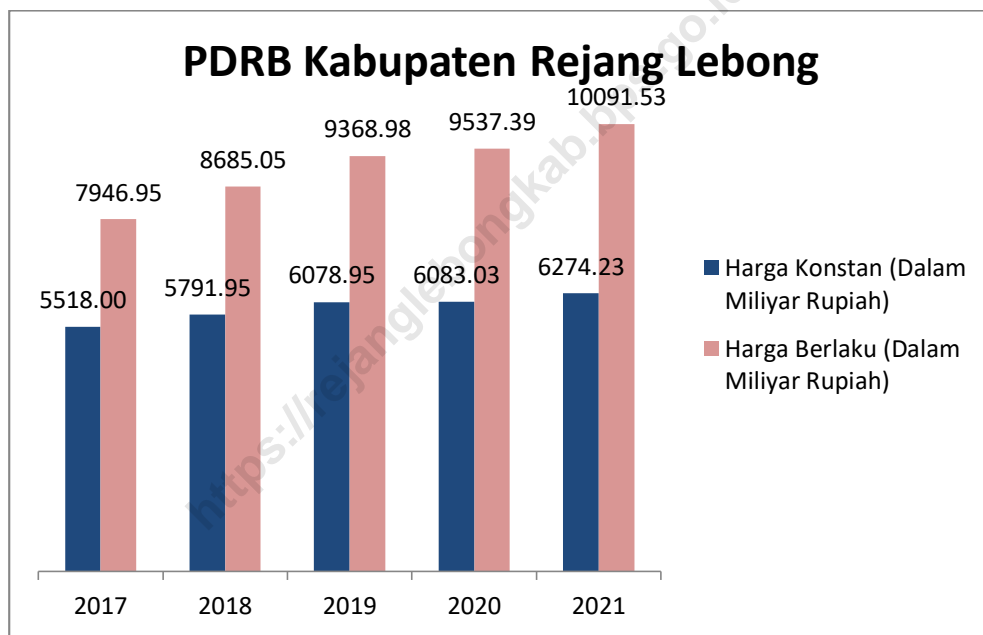
Selanjutnya kontribusi lapangan usaha terbesar kedua di Kabupaten Rejang Lebong adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan *share* sebesar 16,86 persen pada Tahun 2021. Kontribusi dari sektor ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kontribusi Tahun 2020 setelah mengalami penurunan pada Tahun 2020 akibat dampak dari Pandemi covid-19.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong pada 2020 merupakan laju pertumbuhan PDRB dengan nilai terkecil dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,07 persen. Hal tersebut merupakan dampak pandemi virus Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020. Sedangkan pada Tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB kembali mengalami peningkatan menjadi 3,14 persen.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Rejang Lebong pada 2021 nilai tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,93 persen, mengalami percepatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang bernilai 5,11 persen. Lapangan Usaha Jasa Perusahaan merupakan sektor yang terkena dampak cukup besar dari pandemic Covid-19 di Indonesia karena adanya kebijakan larangan bepergian dan pembatasan sosial. Laju

pertumbuhan lapangan usaha tersebut sebesar minus 1,93 persen. Laju pertumbuhan tertinggi kedua menurut harga konstan dicapai oleh lapangan usaha penyediaan listrik dan gas 7,90 persen naik sebesar 0,46 persen dibandingkan Tahun 2020. Sedangkan laju pertumbuhan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,69 persen mengalami percepatan dibandingkan Tahun 2020 yang memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 0,47 persen

Gambar 6. PDRB Kab. Rejang Lebong Tahun 2017-2021



Gambar 7. PDRB Kab. Rejang Lebong Tahun 2017-2021

BAB 4

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KABUPATEN REJANG LEBONG

Pembangunan nasional Indonesia menempatkan manusia sebagai titik sentral sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai suatu sumber daya.

United Nations Development Programme (UNDP) melakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia melalui suatu ukuran komposit yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan keterampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, IPM tidak memasukkan aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur bangsa ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya alasan teknis yaitu sulit mengukur aspek tersebut dan formula penghitungan menjadi tidak sederhana. Namun demikian, dalam memberikan pengukuran tunggal dan sederhana dari upaya pembangunan, penggunaan indeks ini cukup memadai.

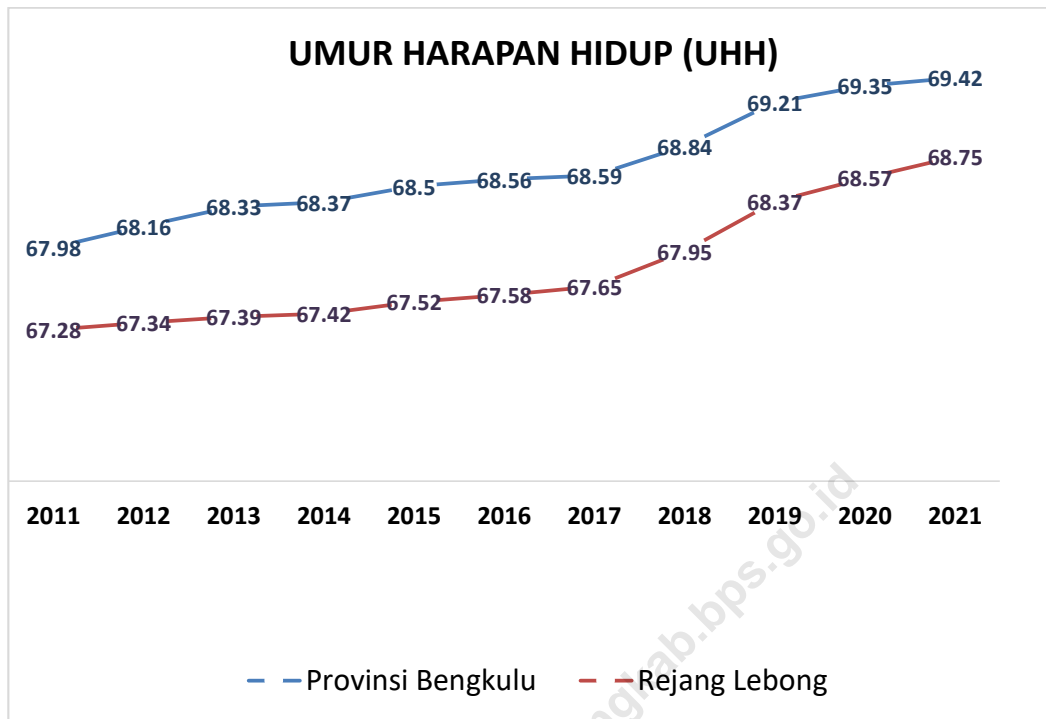
IPM merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan/pengetahuan, dan indikator pengeluaran. Indikator kesehatan tercermin dalam Indeks Harapan Hidup.

indikator pendidikan/pengetahuan tercermin dalam Indeks Pendidikan dan indikator pengeluaran tercermin dalam Indeks Daya Beli. Ketiga indikator dasar tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

4.1. Umur Harapan Hidup

Perbandingan antar indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tinjauan parsial. artinya tingkat pembangunan baru diukur dari satu komponen. Pada tahun 2021 umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar 68,75 tahun. Hal ini berarti rata-rata umur penduduk di Kabupaten Rejang Lebong yang lahir pada tahun 2021 sampai dengan meninggal adalah 68,75 tahun. UHH ini lebih rendah daripada umur harapan hidup penduduk Provinsi Bengkulu yang berada dikisaran 69,42 tahun. Namun demikian, umur harapan hidup penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang bernilai 68,57 tahun. Umur harapan hidup ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong telah memberi dampak positif pada perbaikan umur hipotesis yang semakin panjang.

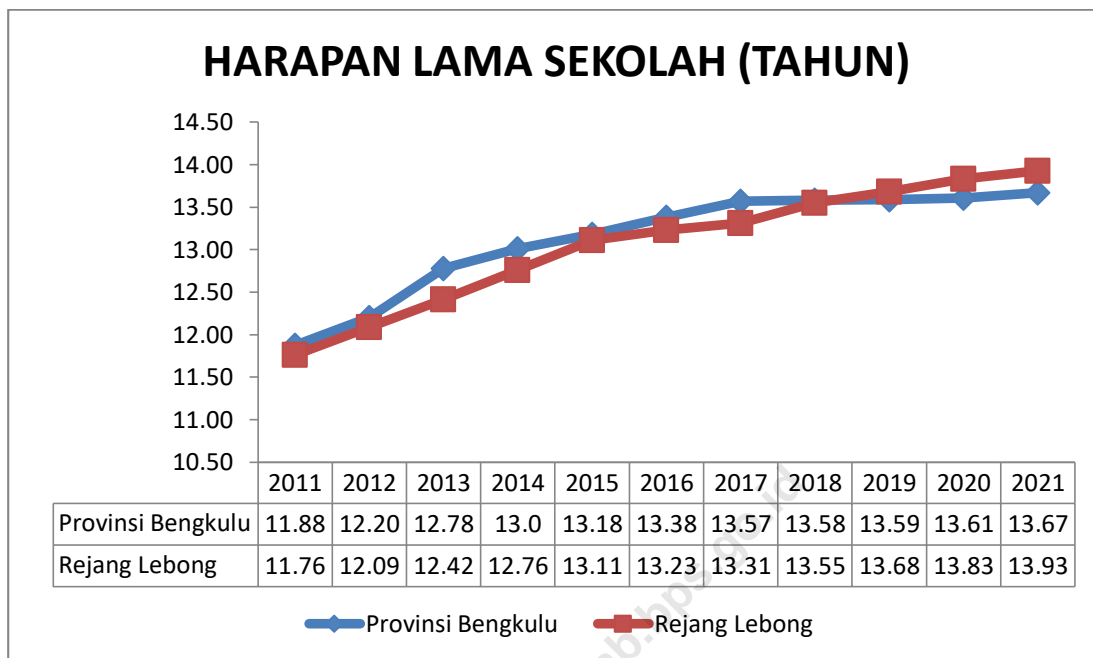
Faktor lain yang memberikan sumbangan positif dalam peningkatan umur harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih modern akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk.



Gambar 8. Umur Harapan Hidup Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021

4.2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Harapan lama sekolah/HLS (*expected years of schooling/EYS*) Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2021 adalah sebesar 13,93 tahun. Setiap tahunnya sejak 2011 hingga 2021 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rejang Lebong selalu meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



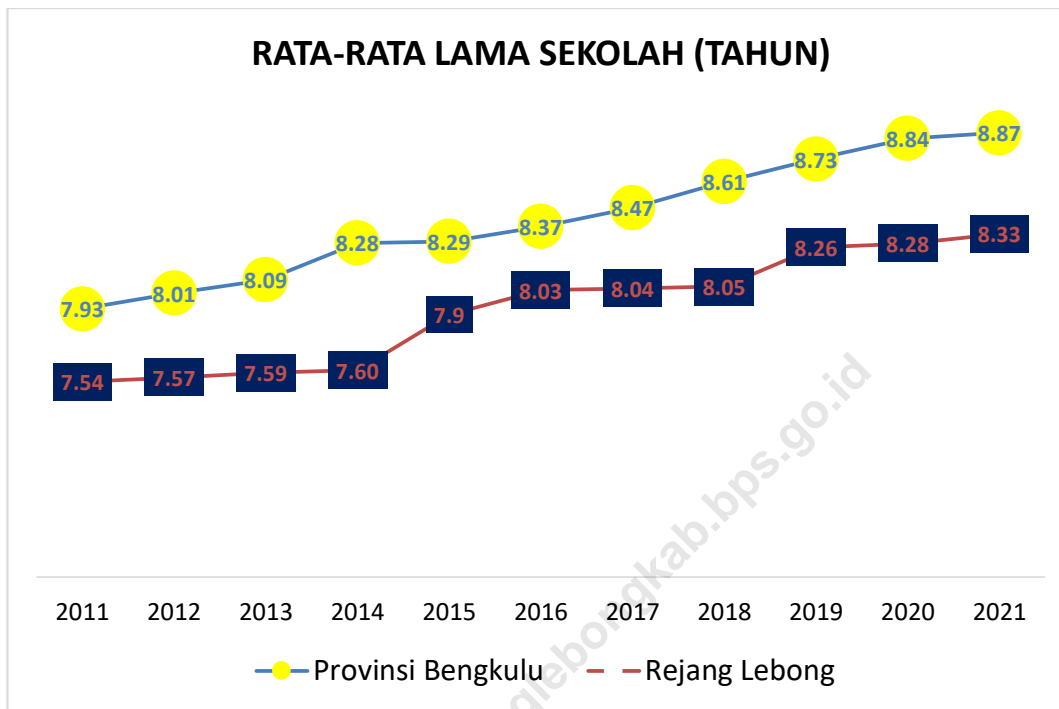
Gambar 9. Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021

Pada Tahun 2021, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rejang Lebong lebih tinggi dibandingkan HLS Provinsi Bengkulu. Namun, perkembangan HLS setiap tahun di Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan.

Sedangkan Angka rata-rata lama sekolah/RLS (*Mean years of schooling/MYS*) di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan dari 8,84 tahun Pada 2020 menjadi 8,87 tahun pada 2021. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Rejang Lebong bersekolah selama 8 sampai 9 tahun. Dengan angka rata-rata lama sekolah ini menunjukkan sumber daya manusia di Kabupaten Rejang Lebong masih tergolong rendah dan dibawah program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah.

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Rejang Lebong lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang mencapai 8,87

tahun. Data angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

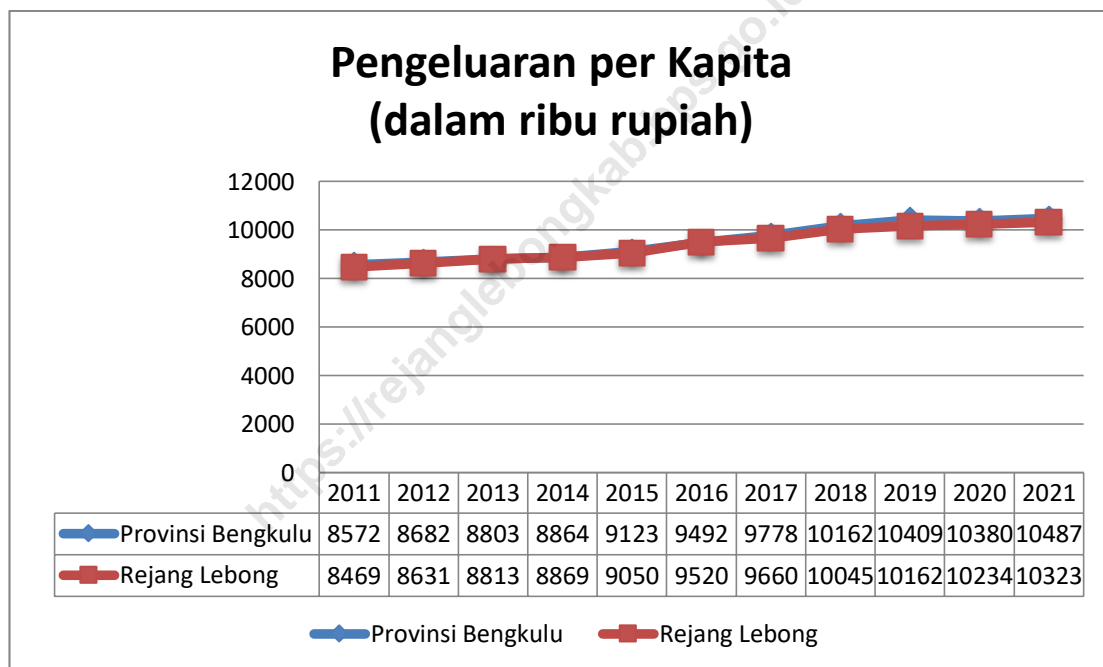


Gambar 10. Rata-Rata Lama Sekolah di Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021

4.3. Indeks Daya Beli

Komponen paritas daya beli yang dikenal dengan komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil perkapita yang disesuaikan (UNDP menggunakan indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Besaran nilai Indeks Daya Beli menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai Indeks Daya Beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin baik.

Komponen paritas daya beli yang dikenal dengan komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil perkapita yang disesuaikan (UNDP menggunakan indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara). Besaran nilai Indeks Daya Beli menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai Indeks Daya Beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin baik.

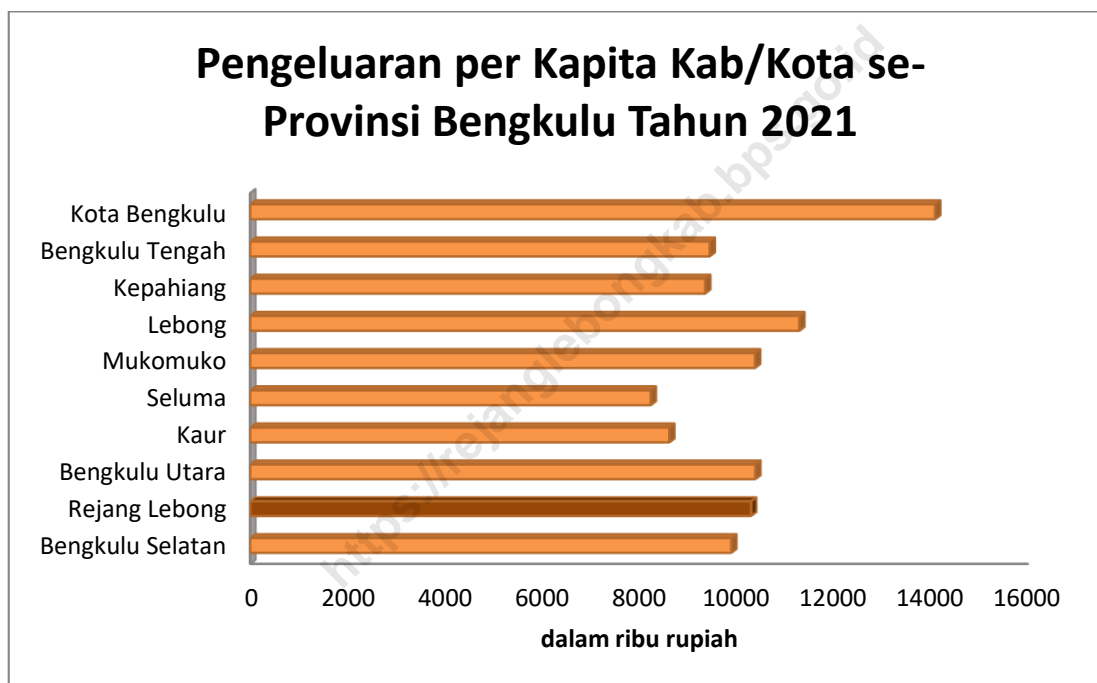


Gambar 11. Pengeluaran per kapita Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021

Daya beli penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang dicerminkan oleh besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, Tahun 2021 meningkat dari 10,234 juta menjadi 10,323 juta rupiah. Bila diperhatikan pola yang terjadi dari 2011 besaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Bila dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Bengkulu yang

mempunyai besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan pada angka 10,487 juta rupiah maka kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu.

Kemudian jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021, Kab. Rejang Lebong berada di posisi kelima di bawah Kota Bengkulu, Lebong, Bengkulu Utara, dan Mukomuko seperti yang disajikan pada grafik di bawah ini.



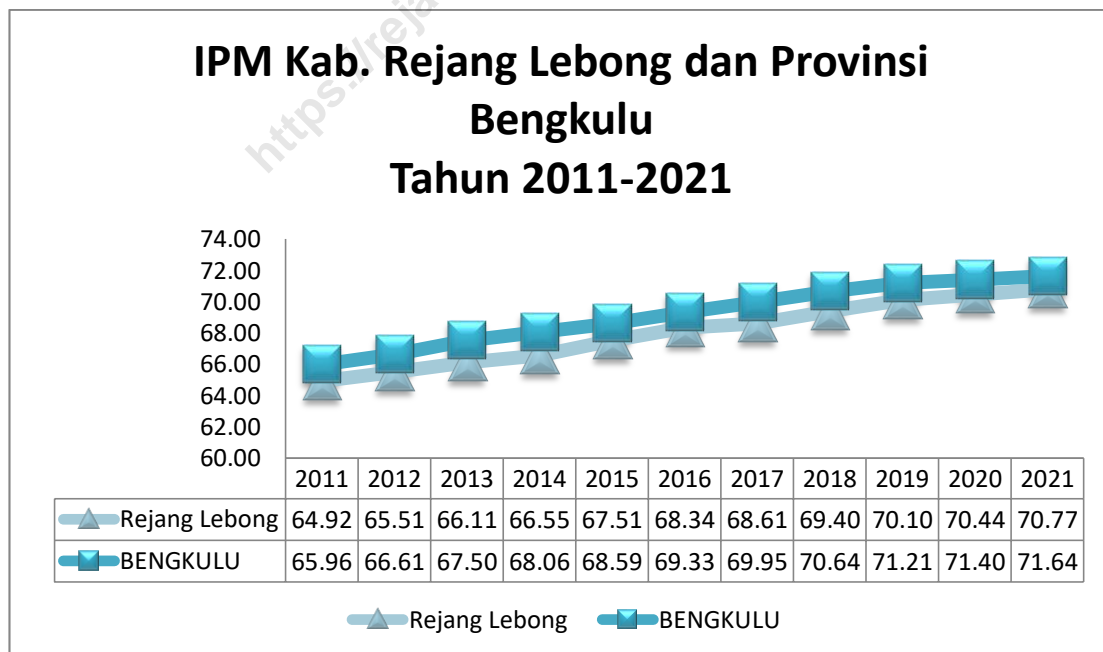
Gambar 12. Pengeluaran per Kapita Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021

4.4. Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah memperlihatkan perkembangan suatu wilayah bukan dilihat berdasarkan ranking. Bagi suatu wilayah, angka IPM menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik.

Menurut skala internasional angka IPM Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori kesejahteraan tinggi. Nilai IPM Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 adalah 70,77. Angka ini mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011 sampai 2021. Demikian juga dengan nilai IPM Provinsi Bengkulu sejak tahun 2020 hingga 2021 termasuk dalam kategori kesejahteraan tinggi. Hal ini tercermin dari angka IPM Provinsi Bengkulu sebesar 71,401 pada 2020 dan 71,64 pada 2021.

Dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Rejang Lebong 2021 meningkat sebesar 0,33 poin. Sedangkan pertumbuhan IPM untuk Provinsi Bengkulu meningkat sebesar 0,24 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Meski demikian, pertumbuhan ini adalah suatu bentuk capaian yang mengarah ke arah maksimal. Dan ke depannya diharapkan angka pertumbuhan IPM ini dapat terus meningkat. Nilai IPM Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 13. IPM Kab. Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2021

4.5. Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari capaian IPM antar kabupaten/kota pada Tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong berada pada peringkat ke-tiga dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Angka IPM tertinggi adalah di Kota Bengkulu yang diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan menurut Berita Resmi Statistik tentang IPM Tahun 2021 menyatakan Provinsi Bengkulu dengan angka IPM sebesar 71,75 menempati peringkat ke-18 dari seluruh provinsi di Indonesia pada Tahun 2021.

Tabel 11. Nilai dan Peringkat IPM Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	IPM		Peringkat IPM	
	2020	2021	2020	2021
BENGKULU	71,40	71,64	18	18
Bengkulu Selatan	70,63	70,75	2	2
Rejang Lebong	70,44	70,77	3	3
Bengkulu Utara	68,82	69,28	4	4
Kaur	66,99	67,17	9	9
Seluma	66,89	67,03	10	10
Mukomuko	68,45	68,64	5	5
Lebong	67,01	67,46	8	8
Kepahiang	68,17	68,62	6	6
Bengkulu Tengah	67,61	67,96	7	7
Kota Bengkulu	80,36	80,54	1	1

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2011 hingga 2021 meningkat. Hal ini tercermin dari besaran angka IPM Kabupaten Rejang Lebong yang semakin besar dari tahun ke tahun, kondisi nilai IPM terakhir yaitu nilai IPM Tahun 2021 adalah 70,77. Kenaikan angka IPM ini seiring dengan kenaikan seluruh komponen pembentuk IPM yaitu umur harapan hidup sebesar 68,75 dengan harapan lama sekolah sebesar 13,93 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,33 tahun dan pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar 10,323 juta rupiah.

Kabupaten Rejang Lebong berada pada peringkat ke-tiga dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Angka IPM tertinggi adalah di Kota Bengkulu yaitu sebesar 80,54 yang diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Selatan dengan angka IPM sebesar 70,75. Nilai IPM Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 termasuk ke dalam kategori kesejahteraan tinggi. Sama halnya dengan IPM Provinsi Bengkulu yang juga termasuk kategori kesejahteraan tinggi. Untuk itu, diharapkan agar angka IPM ini dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi jalannya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

5.2. Implikasi Kebijakan

Dari pemahaman hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan komponen-komponennya dapat dirancang program peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan penduduk secara umum. Sementara itu, upaya peningkatan daya beli penduduk dapat merupakan dampak berantai dari upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan penduduk.

Upaya peningkatan kesehatan penduduk dapat dilakukan di antaranya melalui:

- ✓ Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup sehat, berupa upaya pencegahan dan upaya pengobatan baik tradisional maupun modern.
- ✓ Meningkatkan ketersediaan obat-obatan modern yang terjangkau oleh masyarakat.
- ✓ Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa revitalisasi Posyandu dan layanan Puskesmas baik keliling maupun biasa.
- ✓ Menggalakkan program-program yang mampu menekan angka kematian bayi dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
- ✓ Memperbaiki mutu lingkungan hidup atau pemukiman sekaligus menanamkan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan pemukiman untuk mengurangi penyebaran penyakit.

Di sisi lain, upaya peningkatan pendidikan masyarakat dapat juga dilakukan antara lain dengan:

- ✓ Penajaman sasaran wajib belajar melalui berbagai jalur.
- ✓ Penyediaan dan penyebaran guru berdedikasi dan berkualitas perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah karena guru merupakan tulang punggung bagi pembentukan pelajar yang berkualitas.
- ✓ Adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang akses masyarakat dalam menjangkau pendidikan formal.

Di bidang ekonomi, perbaikan daya beli masyarakat tidak terlepas dari peningkatan pendapatan. Secara berkesinambungan, jika terjadi peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan, berarti juga telah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan terciptanya generasi-generasi yang siap bersaing di era gobalisasi. Selain itu, peningkatan pendapatan juga tidak terlepas dari berkembangnya dunia usaha dan semakin baiknya iklim investasi untuk menciptakan peluang-peluang usaha. Untuk itu, hendaknya pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mampu menjadi pemicu berkembangnya perekonomian daerah dengan menghidupkan dunia usaha pada berbagai sektor ekonomi dengan melihat potensi daerah yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS Kabupaten Rejang Lebong . 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Rejang Lebong 2021*. Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong
- BPS Kabupaten Rejang Lebong . 2022. *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2021*. Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong
- BPS Kabupaten Rejang Lebong . 2022. *Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha 2017- 2021*. Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong
- BPS Kabupaten Rejang Lebong. 2022. *Raw data Susenas 2021*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu
- BPS Provinsi Bengkulu. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu

DATA

Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REJANG LEBONG**

JL. S. Sukowati No. 36 Curup, Bengkulu, 39114

Telp. (0732) 21153

Website: rejanglebongkab.bps.go.id E-mail: bps1702@bps.go.id



9 772716 303003